



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MENDORONG PERBAIKAN SISTEM SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA

Nurfadhilah Arini

Analisis Kebijakan Ahli Pertama
nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan terhadap sistem seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Menteri PAN RB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa panitia seleksi nasional dan instansi terkait bersikap terbuka terhadap setiap masukan dari berbagai pihak, serta akan terus melakukan perbaikan sistem seleksi CASN secara berkesinambungan. Pernyataan tersebut diberikan sebagai tanggapan atas masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga mengenai seleksi CASN 2024, termasuk yang berkaitan dengan banyaknya formasi tidak terisi.

Sejumlah perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga sebelumnya menghadiri diskusi Penyelenggaraan Layanan Publik dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 di Ombudsman RI. Diskusi yang berlangsung pada Rabu, 9 Juli 2025 tersebut juga dihadiri oleh sejumlah lembaga penelitian. Berdasarkan hasil diskusi, tingginya jumlah formasi yang belum terisi menjadi catatan penting dari hasil seleksi tahun lalu. Merujuk data seleksi tahun 2024 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), setidaknya terdapat 397.631 formasi CASN masih kosong. Angka tersebut terdiri atas 67.960 formasi CPNS dan 329.671 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kekosongan pelamar terjadi pada beberapa formasi, termasuk formasi dosen dan tenaga kesehatan. Direktur Sumber Daya dan Pengadaan Barang/Jasa sekaligus dosen Rekayasa Keselamatan Kebakaran Universitas Negeri Jakarta, Jafar Amiruddin, menyebut bahwa formasi dosen memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi dengan imbalan relatif biasa. Akibatnya, profesi dosen di universitas negeri kini sepi peminat. Selain itu, lulusan S-2 di bidang sains dan teknik juga masih minim, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan. Sementara pada kasus tenaga kesehatan, kendala utama untuk memenuhi formasi adalah banyak tenaga medis yang memilih bekerja di sektor swasta.

Menyikapi kekosongan formasi CASN 2024, pemerintah sesungguhnya telah melakukan beberapa langkah strategis. Skema optimalisasi digunakan oleh pemerintah untuk formasi yang memiliki urgensi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, khususnya pelayanan dasar. Melalui skema optimalisasi ini, peserta yang memenuhi ambang batas, tetapi tidak berstatus lulus ditempatkan pada jabatan yang dilamar. Setidaknya terdapat 16.731 peserta seleksi CPNS dan 29.744 peserta seleksi PPPK yang diakomodasi melalui skema optimalisasi. Meskipun begitu, beberapa peserta seleksi yang diakomodasi melalui skema ini justru kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri.

Berdasarkan data BKN, setidaknya terdapat 1.967 peserta atau setara dengan 12% dari peserta yang diakomodasi melalui skema optimalisasi justru memutuskan mengundurkan diri pada seleksi CASN 2024. Dengan demikian, sejumlah formasi yang kosong masih belum dapat dipenuhi.

Keseluruhan hal tersebut harus mendapat perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia aparatur, tetapi juga berimplikasi pada efisiensi penggunaan anggaran negara, mengingat proses seleksi memerlukan sumber daya yang cukup besar. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia aparatur juga berpotensi berpengaruh signifikan bagi kinerja instansi, khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, perbaikan terhadap manajemen ASN, termasuk pada proses pengadaan ASN, harus dilakukan secara terus menerus.

Hingga saat ini, pemerintah masih berfokus pada penyelesaian seleksi CASN 2024. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan penataan terhadap tenaga non-ASN yang menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi. Diperkirakan bahwa terdapat sekitar 300–400 ribu posisi yang dibutuhkan di berbagai kementerian/lembaga, namun pembukaan formasi masih menunggu persetujuan dari presiden. Sebelum proses pengadaan baru diselenggarakan, penting untuk terus mengawal langkah-langkah perbaikan berkelanjutan terhadap seluruh tahapan dalam pengadaan CASN. Dalam konteks ini, DPR RI memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa hasil evaluasi pengadaan CASN 2024 digunakan sebagai landasan bagi usaha perbaikan pengadaan CASN di masa mendatang.

Atensi DPR

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Komisi II DPR RI perlu memastikan bahwa hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan seleksi CASN 2024 dapat ditindaklanjuti melalui perbaikan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan. Melalui mekanisme rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian PANRB dan BKN dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Komisi II DPR RI juga dapat mendorong agar hasil evaluasi CASN 2024 dapat menjadi dasar penyempurnaan pada pengadaan CASN selanjutnya. Hal ini mencakup tahap penyusunan formasi, manajemen seleksi, hingga tahap penempatan yang harus direncanakan secara strategis. Komisi II DPR RI juga dapat mendorong Kementerian PANRB untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Manajemen ASN sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber

Kompas, 09 dan 10 Juli 2025; dan *tempo.co*, 08 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making